



## **SINERGI PENGABDIAN AKADEMISI DALAM PENGUATAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI NARASUMBER PEMBANDING PADA FORUM PERANGKAT DAERAH**

**Dermawan Zebua<sup>1)</sup>, Jun Fajar Krisman Giawa<sup>2)</sup>, Kevin Berkas Mendrofa<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia  
Email: [dermawannzebua@unias.ac.id](mailto:dermawannzebua@unias.ac.id)

<sup>2)</sup> Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia  
Email: [junfajar2@gmail.com](mailto:junfajar2@gmail.com)

<sup>3)</sup> Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia  
Email: [kevinberkas@gmail.com](mailto:kevinberkas@gmail.com)

### **Abstract**

The involvement of academics in regional development planning is a tangible implementation of the university's community service mission under the Tri Dharma of Higher Education. This community service activity aimed to strengthen regional infrastructure development planning through the role of academics as resource persons and technical reviewers in the Regional Government Work Plan (RKPD) Forum of Gunungsitoli City for the 2027 planning year. The activity employed a participatory assistance approach by providing technical input, evaluation, and recommendations on development programs proposed by Regional Government Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPD). The implementation consisted of four stages: preparation, forum implementation, technical recommendation delivery, and evaluation. The results demonstrated that academic participation contributed positively to improving the quality of regional planning documents, particularly in road infrastructure, drainage systems, clean water supply, solid waste management, public building development, disaster risk mitigation, and sustainable infrastructure planning. Interactive discussions between academics and local government agencies generated evidence-based technical recommendations that were considered in refining the 2027 RKPD. Furthermore, the activity strengthened collaboration between higher education institutions and the Government of Gunungsitoli City in promoting participatory, evidence-based, and community-oriented development planning. Therefore, the role of academics as technical reviewers in the Regional Government Work Plan Forum proved effective in enhancing the quality of regional development planning and supporting sustainable, resilient, and efficient infrastructure development.

**Keywords:** Community Service; Infrastructure Planning; Regional Development; Regional Government Work Plan (RKPD); Regional Planning Forum.

### **Abstrak**

Keterlibatan akademisi dalam proses perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur daerah melalui peran akademisi sebagai narasumber sekaligus pembanding pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2027. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif melalui penyampaian masukan, evaluasi, dan rekomendasi teknis terhadap rencana program pembangunan yang dipaparkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan forum, penyampaian rekomendasi teknis, dan evaluasi hasil kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan, terutama pada aspek pembangunan jalan, sistem drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pembangunan gedung publik, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana. Diskusi yang berlangsung secara interaktif menghasilkan berbagai rekomendasi teknis yang menjadi bahan pertimbangan bagi OPD dalam penyempurnaan RKPD Tahun 2027. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis bukti ilmiah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran akademisi sebagai pembanding dalam Forum Perangkat Daerah terbukti mampu meningkatkan kualitas proses penyusunan RKPD serta mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap tantangan pembangunan di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Forum Perangkat Daerah; Infrastruktur Daerah; Pengabdian kepada Masyarakat; Perencanaan Pembangunan; RKPD.



## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman tahunan yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan media sebagaimana konsep kolaborasi pentahelix. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih berkualitas, berbasis kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh kajian ilmiah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017).

Dalam pelaksanaannya, Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD. Forum ini menjadi media sinkronisasi antara usulan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, arah pembangunan nasional, serta program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui forum tersebut dilakukan pembahasan prioritas pembangunan, evaluasi program tahun sebelumnya, serta penyempurnaan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, Forum Perangkat Daerah tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi juga menjadi ruang diskusi ilmiah dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif dan akuntabel (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004).

Pada sektor infrastruktur, kualitas perencanaan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem drainase, penyediaan air bersih, sanitasi, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya harus direncanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, serta mitigasi risiko bencana. Kesalahan pada tahap perencanaan dapat berdampak terhadap meningkatnya biaya pembangunan, rendahnya kualitas layanan publik, hingga kegagalan fungsi infrastruktur pada masa mendatang (United Nations, 2015).

Perkembangan paradigma pembangunan saat ini juga menempatkan konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Infrastruktur yang direncanakan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mampu menjamin keberlanjutan sumber daya, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan aspek keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD memerlukan masukan ilmiah yang mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan teknis dan kebijakan secara berimbang (United Nations, 2015).

Salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat, adalah keterlibatan akademisi dalam

memberikan pendampingan, konsultasi, maupun masukan teknis kepada pemerintah daerah. Akademisi memiliki kompetensi untuk mengkaji permasalahan pembangunan berdasarkan hasil penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, serta standar dan regulasi teknis yang berlaku. Kehadiran akademisi sebagai narasumber sekaligus pembanding dalam Forum Perangkat Daerah menjadi sarana transfer pengetahuan (knowledge transfer) yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penyampaian rekomendasi berbasis bukti (evidence-based planning) (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023).

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2027, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah yang dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, akademisi berperan sebagai pembanding pada bidang teknik dengan memberikan telaah terhadap usulan program pembangunan infrastruktur yang dipaparkan oleh masing-masing perangkat daerah. Proses pembahasan difokuskan pada aspek kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kelayakan teknis, efektivitas pelaksanaan, efisiensi anggaran, keberlanjutan pembangunan, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Masukan yang diberikan selama forum meliputi penguatan kualitas perencanaan jaringan jalan, sistem drainase perkotaan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pembangunan gedung publik yang memenuhi standar keselamatan, mitigasi risiko gempa bumi mengingat wilayah Kota Gunungsitoli berada pada kawasan rawan seismik, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dokumen RKPD sehingga lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi teknis bagi pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Kolaborasi semacam ini merupakan bentuk nyata kontribusi akademisi terhadap pembangunan daerah melalui penyediaan solusi yang aplikatif, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi media implementasi hasil kajian akademik agar dapat dimanfaatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menguatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur daerah melalui pemberian masukan akademik sebagai pembanding pada Forum Perangkat Daerah RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027, sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan



pembangunan daerah yang efektif, partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis bukti ilmiah.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui keterlibatan akademisi sebagai narasumber sekaligus pembanding bidang teknik pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2027. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif (*participatory assistance*) melalui pemberian masukan, evaluasi, dan rekomendasi teknis terhadap rencana program pembangunan yang dipaparkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendekatan ini menempatkan akademisi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui kajian ilmiah dan pengalaman profesional.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan forum, pemberian rekomendasi teknis, serta evaluasi hasil kegiatan.

### **2.1 Tahap Persiapan**

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gunungsitoli sebagai penyelenggara Forum Perangkat Daerah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi agenda kegiatan, penelaahan dokumen awal RKPD, serta pengumpulan informasi mengenai isu-isu strategis pembangunan daerah yang akan dibahas dalam forum.

Selanjutnya dilakukan kajian terhadap berbagai dokumen pendukung, antara lain:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Rancangan RKPD Tahun 2027;
- Dokumen Renja OPD;
- Data pembangunan infrastruktur daerah;
- Peraturan dan standar teknis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Kajian tersebut bertujuan untuk mempersiapkan bahan masukan yang berbasis data dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

### **2.2 Tahap Pelaksanaan Forum**

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala OPD, Bappeda, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahap ini setiap OPD memaparkan rencana program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam RKPD Tahun 2027. Selanjutnya akademisi bertindak sebagai pembanding dengan memberikan telaah terhadap program yang dipresentasikan berdasarkan aspek:

- kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah;
- kelayakan teknis;
- efektivitas pelaksanaan program;
- efisiensi penggunaan anggaran;
- keberlanjutan pembangunan;
- manfaat bagi masyarakat.

Diskusi dilakukan secara interaktif sehingga setiap OPD memperoleh masukan secara langsung untuk penyempurnaan rencana program yang disusun.

### **2.3 Tahap Pemberian Masukan dan Rekomendasi Teknis**

Masukan yang diberikan dalam forum difokuskan pada bidang teknik dan pembangunan infrastruktur. Rekomendasi disampaikan secara lisan selama proses diskusi serta didokumentasikan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RKPD.

Beberapa aspek yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

- pembangunan dan peningkatan kualitas jalan;
- pembangunan jembatan;
- sistem drainase perkotaan;
- penyediaan air bersih;
- sanitasi lingkungan;
- pengelolaan persampahan;
- pembangunan gedung publik;
- mitigasi risiko bencana, khususnya gempa bumi;
- penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- efektivitas dan prioritas pengalokasian anggaran pembangunan.

Setiap rekomendasi disampaikan berdasarkan prinsip *evidence-based planning*, yaitu mempertimbangkan data pembangunan daerah, kondisi lapangan, standar teknis nasional, serta hasil kajian akademik sehingga rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan dalam penyusunan program pembangunan.

### **2.4 Tahap Evaluasi**

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian forum selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas kontribusi akademisi dalam proses penyusunan RKPD serta mengidentifikasi tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan.

Evaluasi dilakukan melalui:

- identifikasi program yang memperoleh penyempurnaan berdasarkan hasil forum;
- pencatatan rekomendasi teknis yang diterima oleh perangkat daerah;
- diskusi bersama penyelenggara mengenai tindak lanjut hasil forum;
- dokumentasi hasil kegiatan sebagai bahan publikasi pengabdian kepada masyarakat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa forum berlangsung secara interaktif dengan adanya komunikasi dua arah antara perangkat daerah dan akademisi. Masukan yang diberikan menjadi salah satu referensi dalam penyempurnaan rencana program pembangunan sehingga kualitas dokumen RKPD diharapkan semakin baik, lebih realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **2.5 Mitra Pengabdian**

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gunungsitoli, yang bertindak sebagai penyelenggara Forum



Perangkat Daerah RKPD Tahun 2027. Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli berperan sebagai peserta sekaligus penerima manfaat dari rekomendasi teknis yang diberikan selama forum berlangsung.

## 2.6 Indikator Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur berdasarkan beberapa indikator berikut:

**Tabel 1.** Indikator Keberhasilan Kegiatan

| No. | Indikator                                               | Target Capaian              |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah                    | 100%                        |
| 2   | Kehadiran OPD dalam forum                               | ≥90% dari OPD yang diundang |
| 3   | Penyampaian rekomendasi teknis oleh akademisi           | Terlaksana                  |
| 4   | Terjadinya diskusi interaktif antara akademisi dan OPD  | Terlaksana                  |
| 5   | Rekomendasi menjadi bahan penyempurnaan RKPD            | Tercapai                    |
| 6   | Tersusunnya artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat | Tercapai                    |

Metode pelaksanaan ini dirancang untuk memastikan bahwa kontribusi akademisi tidak hanya berupa penyampaian pendapat, tetapi juga menghasilkan rekomendasi teknis yang berbasis data, selaras dengan regulasi, dan dapat diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027. Pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.



**Gambar 1.** Mendengarkan paparan OPD

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui partisipasi akademisi sebagai narasumber sekaligus pembanding bidang teknik pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2027. Forum ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD yang bertujuan menyelaraskan program kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dengan arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pembangunan nasional.

Melalui forum tersebut, setiap OPD memaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya dilakukan proses pembahasan secara partisipatif dengan melibatkan akademisi untuk memberikan telaah ilmiah, masukan teknis, serta rekomendasi terhadap usulan program yang dipresentasikan. Pendekatan ini memberikan ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.

## 3.1 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027

Forum Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan menghadirkan seluruh kepala OPD, pejabat teknis, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan berlangsung dalam suasana diskusi yang interaktif, di mana setiap perangkat daerah menyampaikan capaian pembangunan, evaluasi program sebelumnya, serta usulan kegiatan prioritas untuk Tahun 2027.

Sebagai pembanding bidang teknik, penulis memberikan masukan berdasarkan aspek teknis, keberlanjutan pembangunan, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, dan manfaat terhadap masyarakat. Setiap usulan program dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi eksisting Kota Gunungsitoli, arah pembangunan daerah, serta prinsip pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

## 3.2 Peran Akademisi sebagai Pembanding Bidang Teknik

Keterlibatan akademisi dalam forum memberikan nilai tambah terhadap proses penyusunan RKPD karena rekomendasi yang disampaikan didasarkan pada kajian ilmiah, pengalaman profesional, serta perkembangan teknologi di bidang teknik sipil dan pembangunan infrastruktur.

Selama forum berlangsung, beberapa aspek yang menjadi perhatian utama meliputi:

- kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat;
- prioritas pembangunan infrastruktur;
- efektivitas penggunaan anggaran daerah;
- aspek keselamatan konstruksi;
- ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam;
- penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peran akademisi tidak hanya memberikan tanggapan terhadap usulan yang dipaparkan, tetapi juga menawarkan alternatif solusi teknis yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan. Diskusi yang berlangsung menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara akademisi dan perangkat daerah sehingga berbagai masukan dapat dipahami secara komprehensif oleh masing-masing OPD.





### 3.3 Hasil Pembahasan Bidang Infrastruktur

Berdasarkan hasil diskusi bersama perangkat daerah, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027.

#### a. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan jalan masih menjadi prioritas utama karena berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam forum disampaikan bahwa peningkatan kualitas jalan perlu mempertimbangkan volume lalu lintas, kondisi tanah dasar, sistem drainase, dan pemeliharaan berkala agar umur layanan jalan menjadi lebih panjang.

Selain pembangunan fisik, diperlukan pula sistem prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan jalan dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

#### b. Sistem Drainase Perkotaan

Beberapa kawasan di Kota Gunungsitoli masih mengalami genangan pada saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan drainase tidak hanya difokuskan pada pembangunan saluran baru, tetapi juga normalisasi saluran yang telah ada, peningkatan kapasitas saluran, serta pemeliharaan secara berkala.

Masukan yang diberikan menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan jalan dan sistem drainase sehingga kedua infrastruktur tersebut dapat berfungsi secara optimal.

#### c. Mitigasi Bencana Gempa

Kota Gunungsitoli berada pada wilayah dengan tingkat aktivitas seismik yang cukup tinggi sehingga aspek mitigasi gempa menjadi perhatian dalam setiap pembangunan infrastruktur.

Rekomendasi yang disampaikan meliputi:

- penerapan standar nasional dalam perencanaan bangunan;
- peningkatan kualitas pengawasan konstruksi;
- penggunaan material yang memenuhi standar;
- pembangunan fasilitas publik yang tahan gempa;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang konstruksi.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko kerusakan bangunan apabila terjadi gempa bumi di masa mendatang.

#### d. Infrastruktur Berkelanjutan

Selain aspek teknis, forum juga membahas pentingnya pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Program pembangunan diarahkan agar mampu memberikan manfaat jangka panjang melalui efisiensi penggunaan sumber daya, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:

- pengembangan ruang terbuka hijau;
- penggunaan material ramah lingkungan;
- pengelolaan air hujan;
- peningkatan sistem persampahan;
- pembangunan infrastruktur rendah emisi.

### 3.4 Respons Organisasi Perangkat Daerah

Selama kegiatan berlangsung, seluruh kepala OPD memberikan respons yang positif terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh akademisi. Diskusi berlangsung secara terbuka sehingga berbagai permasalahan teknis dapat dibahas secara bersama-sama.

Sebagian besar perangkat daerah menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan program sebelum dokumen RKPD difinalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif.

**Tabel 2.** Ringkasan Rekomendasi Akademisi pada Forum Perangkat Daerah RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027

| No | Bidang                      | Permasalahan                                                   | Rekomendasi                                                             |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jalan                       | Masih terdapat ruas jalan yang memerlukan peningkatan kualitas | Menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan manfaat ekonomi  |
| 2  | Drainase                    | Genangan pada beberapa kawasan perkotaan                       | Integrasi pembangunan jalan dan drainase serta normalisasi saluran      |
| 3  | Bangunan Gedung             | Perlunya peningkatan standar keselamatan                       | Menerapkan standar konstruksi tahan gempa                               |
| 4  | Air Bersih                  | Kebutuhan pelayanan masih meningkat                            | Pengembangan jaringan distribusi secara bertahap                        |
| 5  | Persampahan                 | Pengelolaan belum optimal                                      | Peningkatan sarana dan sistem pengelolaan berbasis lingkungan           |
| 6  | Infrastruktur Berkelanjutan | Belum seluruh program mengakomodasi aspek keberlanjutan        | Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program |

### 3.5 Dampak Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan memberikan beberapa dampak positif terhadap proses penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027, antara lain:

- meningkatkan kualitas diskusi teknis antara akademisi dan perangkat daerah;
- memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kota Gunungsitoli;



- menghasilkan rekomendasi teknis yang dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPd;
- meningkatkan pemahaman OPD mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana; serta
- memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kontribusi nyata akademisi dalam mendukung pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi sebagai pembanding pada Forum Perangkat Daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Melalui rekomendasi teknis yang berbasis keilmuan dan kondisi lapangan, proses penyusunan RKPd menjadi lebih komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang efektif, aman, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Gunungsitoli.



**Gambar 2.** Memberikan tanggapan ke OPD

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui keterlibatan akademisi sebagai narasumber sekaligus pembanding bidang teknik pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) Kota Gunungsitoli Tahun 2027 telah memberikan kontribusi positif terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan pemerintah daerah, perangkat daerah, dan akademisi dalam mendiskusikan berbagai program prioritas sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Peran akademisi dalam memberikan telaah ilmiah, masukan teknis, dan rekomendasi terhadap program pembangunan infrastruktur mampu memperkuat kualitas perencanaan pada berbagai sektor, seperti pembangunan jalan, sistem drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pembangunan gedung publik, serta penerapan prinsip mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyempurnakan usulan program yang akan dimuat dalam RKPd Kota Gunungsitoli Tahun 2027.

Selain menghasilkan rekomendasi teknis, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat, melalui pemanfaatan kompetensi akademisi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data, kajian ilmiah, dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, keterlibatan akademisi sebagai pembanding pada Forum Perangkat Daerah terbukti memberikan nilai tambah terhadap proses penyusunan RKPd. Model kolaborasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, akuntabel, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli.

## Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Gunungsitoli diharapkan terus melibatkan akademisi dan tenaga ahli pada setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar rekomendasi yang dihasilkan semakin berbasis bukti (*evidence-based planning*).
2. Organisasi Perangkat Daerah perlu memperkuat penyusunan program dengan didukung oleh data teknis, hasil penelitian, serta evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya sehingga prioritas pembangunan dapat ditetapkan secara lebih tepat.
3. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu ditingkatkan sebagai implementasi pendekatan *pentahelix* dalam mendukung pembangunan daerah yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
4. Kegiatan serupa sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap proses penyusunan dokumen perencanaan daerah agar terjadi transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan program pembangunan yang berkualitas, khususnya di bidang infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmouch, A., & Clavreul, D. (2016). Stakeholder engagement for inclusive water governance: Practices and lessons from the OECD. *Water*, 8(5), 204. <https://doi.org/10.3390/w8050204>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>



- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). *Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy*. Routledge.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- OECD. (2020). *The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- United Cities and Local Governments. (2021). *The sustainable development goals and local governments*. United Cities and Local Governments.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Bank. (2020). *Infrastructure governance for development*. World Bank. <https://www.worldbank.org>